KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

**Judul** : Komisi V merasa miris, tiket pesawat ke Aceh mahal
**Tanggal** : Rabu, 14 Januari 2026
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka
**Halaman** : 3

## Komisi V Merasa Miris

# Tiket Pesawat Ke Aceh Mahal

FOTO: WEB PKB



**Syaiful Huda**

WAKIL Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda meminta Pemerintah mereformasi struktur biaya tiket pesawat domestik. Sebab harga tiket pesawat ke luar negeri lebih murah dibanding dalam negeri.

"Ini adalah ironi kedaulatan udara kita. Tiket Jakarta-Medan bisa menyentuh Rp 8-9 juta saat bencana, sementara Jakarta-Kuala Lumpur hanya Rp 1,5 juta," ujar Huda dalam keterangannya, Selasa (13/1/2026).

Diketahui, fenomena mahalnya harga tiket pesawat domestik mencuat setelah Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan relawan medis yang ditugaskan ke Aceh harus menempuh rute transit via Kuala Lumpur, Malaysia. Hal ini dilakukan demi mendapatkan biaya perjalanan yang lebih murah.

"Yang penting jalan, kita kirim lewat Malaysia, karena murah. Tiketnya bisa Rp 2 juta," ujar Budi dalam rapat antara DPR dan Pemerintah di Banda Aceh, Aceh, Sabtu (10/1/2026).

Huda melanjutkan, mahalnya harga tiket pesawat domestik karena dipicu oleh beban pajak. Rute domestik dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen, sementara rute internasional justru nol persen.

Tingginya harga tiket pesawat di Indonesia, beber Huda, bukan sekadar masalah ketersediaan kursi. Tapi akibat struktur biaya yang tidak efisien dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura.

Dia menyebut ada sejumlah pemicu utama tingginya harga tiket. Pertama, PPN domestik. Kedua, tingginya harga avtur akibat minimnya kompetisi penyedia bahan bakar di bandara. Ketiga, beban bea masuk suku cadang pesawat yang mencapai 70 persen.

Keempat biaya layanan bandara yang langsung dibebankan ke harga tiket konsumen. "Komponen biaya tersebut menjadi faktor pemberat," ucap politikus PKB ini.

Untuk itu, Huda mengaku sudah lama mendorong adanya terobosan kebijakan dari Pemerintah agar harga tiket pesawat domestik ini bisa bersaing dengan negara lain. Khususnya di kawasan ASEAN. Antara lain, penghapusan PPN tiket domestik, relaksasi bea masuk suku cadang, dan membuka ruang bagi multi provider avtur di bandara- bandara utama.

"Tanpa intervensi kebijakan fiskal dan pembongkaran monopoli avtur, maskapai nasional akan terus terjepit biaya operasional yang tinggi dan ujungnya masyarakat yang menjadi korbannya," beber dia.

Dia menyakini, penurunan harga tiket pesawat akan memberikan efek berganda yang signifikan bagi ekonomi nasional. Penurunan tarif sebesar 20 persen diprediksi mampu meningkatkan pergerakan wisatawan nusantara hingga 35 persen. Hal ini juga akan berdampak pada efisiensi logistik kargo udara yang krusial bagi perdagangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan stabilitas harga pangan di daerah terpencil.

"Jika tiket murah, lama menginap wisatawan akan bertambah dan belanja di sektor UMKM akan meningkat," klaim legislator asal Jawa Barat (Jabar) ini.

Selain itu, sektor perdagangan akan lebih efisien karena ongkos kargo udara turun. "Yang terpenting, negara memiliki mobilitas tinggi dalam merespons situasi darurat tanpa harus bergantung pada rute luar negeri," tandasnya. ■ TIF